

**PENERAPAN SISTEM PELAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DARI
MANUAL KE ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN LAPOR LHKPN
(LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA) PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
TAHUN 2019**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Terapan dalam Ilmu Administrasi Bisnis**

DISUSUN OLEH:

**NAMA : ASTRID ANASTASIA
NPM : 1732054134
PROGRAM STUDI : ILMU ADMINISTRASI BISNIS
KONSENTRASI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK**



**SKRIPSI
PROGRAM SARJANA TERAPAN ILMU ADMINISTRASI
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
JAKARTA
2021**

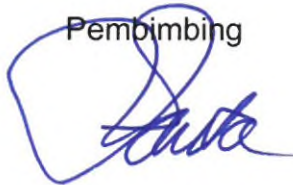
**POLITEKNIK STIA LAN
JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN

NAMA : ASTRID ANASTASIA
NPM : 1732054134
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI BISNIS SEKTOR PUBLIK
KONSENTRASI : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN SISTEM PELAPORAN HARTA
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DARI MANUAL KE ELEKTRONIK TERHADAP
TINGKAT KEPATUHAN LAPOR LHKPN
(LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA) PADA
PEMERINTAH PROVINSI BANTEN TAHUN
2019

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan
pada tanggal 29 Desember 2021

Pembimbing



(Drs. Agoes Inarto, MM)

LEMBAR PENGESAHAN

Diperiksa dan disahkan oleh Tim Penguji Skripsi Sarjana Terapan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara di Jakarta, pada tanggal, 29 Desember 2021



Ketua merangkap anggota,

(Tintin Sri Murtinah, SE, MM)

Sekretaris merangkap anggota

(Budi Priyono, SE, MM)

Anggota

(Drs. Agoes Inarto, MM)

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Astrid Anastasia

NPM : 11732054134

Program Studi : Administrasi Bisnis Sektor Publik

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat dengan judul Penerapan Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Manual ke Elektronik Terhadap Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Pada Pemerintah Provinsi Banten merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Jakarta, Desember 2021



Penulis,

Astrid Anastasia

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus , karena anugerahNya penulis dalam menyelesaikan skripsi dengan judul Penerapan Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Manual ke Elektronik Terhadap Tingkat Kepatuhan Lapor LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Pada Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2019. Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat mencapai gelar sarjana terapan pada Politeknik STIA Lembaga Administrasi Negara Jakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa pihak-pihak yang mendukung dan memberi dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Maka penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Drs. Agoes Inarto, M.M., selaku dosen pembimbing skripsi tugas akhir penulis yang dengan sabar memberikan arahan dan membuka ruang diskusi bagi penulis untuk menuangkan gagasan dan hasil pikir dalam penulisan skripsi tugas akhir ini.
2. Bapak Isnaini, Direktur LHKPN KPK yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait skripsi yang disusun penulis.

3. Bapak Denny Setiyanto, Bapak Jeji Azizi, dan rekan-rekan dari Direktorat LHKPN KPK yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi tugas akhir ini.
4. Marglory Siburian, Sola Gracia Irene Serephina Siburian dan keluarga yang senantiasa memberikan semangat dalam doa bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi tugas akhir ini.
5. Rekan-rekan kuliah program studi ABSP Politeknik STIA LAN Jakarta, yang telah memberikan semangat selama penulisan skripsi tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang telah penulis susun ini jauh dari sempurna hal ini karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh sebab itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi Direktorat LHKPN serta perkembangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, Desember 2021

Penulis

(AS)

ABSTRAK

Astrid Anastasia, 11732054134

PENERAPAN SISTEM PELAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DARI MANUAL KE
ELEKTRONIK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN LAPOR
LHKPN (LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA
NEGARA) PADA PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

Skripsi, x hlm, 89 halaman

Permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah Penerapan Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari proses pendaftaran manual hingga mengalami perubahan ke elektronik di lingkungan Instansi pemerintahan daerah provinsi Banten. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan mendalami terkait upaya yang dilakukan oleh KPK khususnya Direktorat PP LKHPN untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara. Perubahan sistem manual ke elektronik ini diharapkan dapat memberikan efektifitas pada pelaporan harta kekayaan tersebut dalam rangka pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data *Deskriptif Kualitatif*. Yakni menjelaskan tentang LHKPN secara umum bagaimana penerapan sistem manual ke sistem elektronik, kemudian penerapan atau mempertimbangkan kembali perubahan tersebut dapat meningkatkan kepatuhan atau tidak. Proses pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, internet *research*, observasi, maupun wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilihat dari aspek efektifitas pengelolaan dan kepatuhan pelaporan, melaporkan LHKPN secara online sangat efektif meningkatkan kepatuhan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Mendorong komitmen Pimpinan Instansi Daerah untuk mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta pencantuman sanksi contohnya seperti penundaan TPP bagi Wajib Lapo yang tidak melakukan pelaporan LHKPN sangat membantu peningkatan Kepatuhan pelaporan LHKPN.
2. Koordinasi secara berkala dengan Koordinator LHKPN di level top manajemen dan anggota UPL dalam rangka monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN.

Kata kunci: Kepatuhan, LHKPN, Sistem Elektronik

ABSTRACT

Astrid Anastasia, 11732054134

IMPLEMENTATION OF STATE ADMINISTRATIVE ASSETS
REPORTING SYSTEM FROM MANUAL TO ELECTRONIC TO THE
COMPLIANCE LEVEL OF LHKPN REPORT (COUNTRY ASSETS
REPORT) TO THE GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF
BANTEN

Thesis, x pages, 89 pages

The problem studied in this thesis is the application of the State Organizing Assets Reporting System (LHKPN) from the manual registration process to experiencing changes in the Banten provincial government agency. This research was conducted with the aim of obtaining information and exploring related efforts made by the KPK, especially the Directorate of PP LKHPN to improve compliance with reporting state assets. The change from manual to electronic system is expected to provide effectiveness in reporting these assets in preventing corruption, collusion, and nepotism.

In this study, the authors used qualitative descriptive data analysis methods. That is to explain about LHKPN in general how to apply manual systems to electronic systems, then implementing or reconsidering these changes can improve compliance or not. The process of collecting data is done by literature study, internet research, observation, and interviews.

The results showed that from the aspect of management effectiveness and reporting compliance, reporting LHKPN online was very effective in increasing compliance within the Banten Provincial Government. Suggestions that can be given are:

1. Encouraging the Commitment of Regional Agencies Leaders to issue regulations regarding the management of State Administrators Wealth Reports as well as the inclusion of sanctions, for example, delays in TPP for Reporting Obligations who do not report LHKPN, greatly assisting in increasing compliance with LHKPN reporting.
2. Periodic coordination with the LHKPN Coordinator at the top management level and UPL members in the context of monitoring compliance with LHKPN reporting.

Keywords: Compliance, LHKPN, Electronic System

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PERMASALAHAN PENELITIAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Permasalahan.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II : KERANGKA TEORI	
A. Tinjauan Teori.....	8
1. Konsep Sistem.....	8
2. Data, Informasi dan Sistem Informasi.....	10
3. Pengertian Penerapan.....	15
4. Pengertian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	17
5. Pengaturan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.....	20
6. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Negara.....	21
7. Pemerintah Daerah.....	23
8. Kepatuhan.....	24
9. Electronic Government.....	28

10. Penelitian Terdahulu.....	29
B. Konsep Kunci	31
C. Model Berpikir	32
D. Pertanyaan penelitian.....	33
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	34
B. Teknik Pengumpulan Data	36
C. Prosedur Pengolahan dan Analisis Data.....	42
BAB IV : HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lembaga.....	45
1. Sejarah Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).....	45
2. Visi dan Misi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ...	50
3. Tugas dan Fungsi Direktorat PP LHKPN.....	50
4. Struktur Organisasi Direktorat PP LHKPN	54
5. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN di Lingkup Instansi Daerah Tahun 2016-2019	55
B. Analisis Hasil Penelitian	57
1. Aspek Efektivitas Pengelolaan dan Kepatuhan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	57
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
1. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dari Tahun 2001 s/d 2018..	4
2. Kerangka Berpikir	33
3. Business Process Pendaftaran LHKPN	51
4. Struktur Organisasi Direktorat PP LHKPN	55
5. Ikhtisar Kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 - 2019	56
6. Perbedaan Pelaporan LHKPN secara Manual dan Elektronik	59
7. Tata Cara Pendaftaran : (Dokumen Pendukung).....	60
8. User Modul e-Registration	61
9. User Modul e-Filling	63
10. Pengisian modul e-filing oleh PN	63
11. Dokumen Pendukung Isian e-Filling	64
12. Ikhtisar Kepatuhan LHKPN di Pemerintah Provinsi Banten	72

DAFTAR TABEL

Judul Tabel	Halaman
1. Daftar <i>Key Informant</i>	40
2. Ikhtisar Kepatuhan LHKPN di Lingkup Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2016 - 2019	55
3. Ikhtisar Kepatuhan LHKPN di Lingkup Instansi Daerah.....	72

BAB I

PERMASALAHAN PENELITIAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang terus memperbaiki penerapan hukum maupun ketaatan masyarakat pada aturan yang berlaku. Terutama sebagai pejabat negara yang memegang kepercayaan masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diharuskan untuk patuh agar pemerintahan berjalan tanpa adanya praktik korupsi. Mengingat korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi momok tersendiri bagi negara. Maka perlu adanya pengawasan dan perwujudan pemerintahan yang transparansi dan berintegritas dengan bentuk pelaporan harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara atau pejabat negara.

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pasal 1 angka 4 menjelaskan bahwa Penyelenggara Negara (PN) merupakan Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lainnya yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara atau pejabat

publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya pelaporan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh penyelenggara negara merupakan langkah atau kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah tindak pidana korupsi serta sebagai bentuk kepatuhan penyelenggara negara turut serta dalam melakukan pemberantasan korupsi dan meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat kepala pejabat publik.

Selanjutnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Pasal 1 ayat (8) berisi tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya dalam bentuk laporan dokumen maupun dokumen elektronik.

Sistem laporan harta kekayaan penyelenggara negara memiliki dua sistem pelaporan yaitu laporan harta kekayaan dilakukan secara manual dan dilakukan pendaftaran secara elektronik. Perubahan sistem pelaporan ini ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara.

KPK melaporkan sejak 2017 sistem pelaporan LHKPN formulir Model KPK-A/B (model lama) tidak berlaku lagi, perubahan e-LHKPN yang

dilakukan melalui aplikasi e-filling membawa perubahan besar bagi sistem pelaporan harta kekayaan oleh penyelenggara negara. Terbukti pada 2019 jumlah wajib lapor adalah 302.183 orang, yang telah melaporkan LHKPN sebesar 193.993 orang sehingga kepatuhan LKHPN secara nasional adalah sebesar 63,78%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan mengalami perubahan signifikan dari pada sistem pelaporan manual yang tingkat kepatuhan tidak sampai 50% (Negara, 2018).

KPK menjelaskan (Korupsi, 2006) Kewajiban lapor kekayaan diyakini penting oleh banyak negara sebagai media meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pejabat dan Lembaga publik, serta untuk mendukung tercapainya tujuan pemberantasan korupsi yang efektif. Mekanisme pelaporan kekayaan adalah media yang memungkinkan pengawasan kejujuran dan deteksi kemungkinan adanya situasi benturan kepentingan atau tindakan memperkaya diri secara ilegal oleh pejabat publik.

Selanjutnya, perubahan di tingkat kelembagaan yaitu peningkatan fasilitas teknologi sebagai piranti lunak sehingga memungkinkan penerapan pelaporan harta kekayaan secara elektronik sebagaimana keberhasilan Argentina *Corruption Office* meningkatkan kepatuhan PN menjadi 96% dari 67% merupakan salah satu usulan studi untuk memperbaiki mekanisme pelaporan kekayaan PN dan meningkatkan kepatuhan pelaporan kekayaan PN di Indonesia. Dan usulan tersebut akhirnya terealisasi dimulai pada

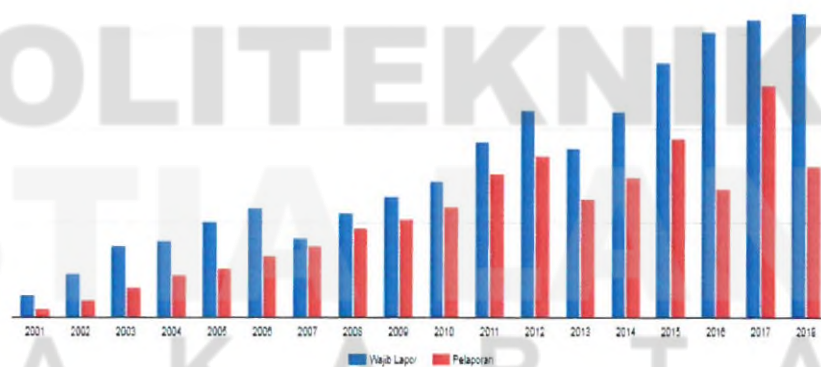
tahun 2018 hingga saat ini sudah diterapkan oleh KPK RI demi memudahkan pelaporan harta kekayaan PN (Korupsi, 2006).

Selain itu, dalam rangka peningkatan kepatuhan pelaporan LHKPN pada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, KPK membentuk Unit pengelola LHKPN dimasing-masing K/L/O/P yang diharapkan dapat membantu PN dalam mengisi harta kekayaannya.

Gambar 1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dari Tahun 2001 s/d 2018

LHKPN

Update 30 Juni 2018



Sumber : acch.kpk.go.id

Dari tahun ke tahun tingkat kepatuhan LHKPN dari dilihat perbedaan yang dilakukan secara manual dan secara eletronik. Dari 2001 hingga 2016 dengan sistem manual pelaporan mengalami perubahan mengalami kenaikan dan penurunan, meski begitu pada 2017 dimulainya

perubahan sistem elektronik memberikan dampak cukup baik pada tingkat kepatuhan LHKPN tersebut.

Pada Perubahan tata cara pelaporan LHKPN dari manual ke elektronik diharapkan dapat memudahkan PN dalam mengisi formulir LHKPN, sehingga angka kepatuhan LHKPN dapat meningkat. Namun yang terus menjadi pertanyaan adalah, seberapa efektifkah pelaporan LHKPN secara elektronik dapat meningkatkan kepatuhan K/L/O/P, sehingga pelaporan LHKPN betul-betul menjadi media yang efektif dalam menguji kejujuran pejabat publik, atau lebih jauh lagi mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia.

Berdasarkan pada uraian tersebut Penulis mengkaji bagaimana ketaatan Penyelenggara Negara dalam melaksanakan kewajibannya untuk melapor harta kekayaan yang dimiliki sebagai bentuk dari partisipasi dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, selain itu peneliti juga akan mengkaji dengan perkembangan sistem pelaporan yang dari awal manual menjadi sistem pelaporan secara elektronik, apakah dapat menjadi salah satu faktor pendukung kepatuhan penyelenggara negara terutama laporan harta kekayaan penyelenggara negara oleh pemerintah daerah khususnya provinsi Banten. Oleh sebab itu, Penulis mengambil judul penelitian ini sebagai berikut: **"Penerapan Sistem Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dari Manual ke Elektronik pada Provinsi Banten"**.

B. Fokus Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perubahan sistem pelaporan LHKPN dari manual ke elektronik dapat meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan, secara khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
2. Apakah pelaporan LHKPN secara elektronik dapat memudahkan Penyelenggara Negara dalam mengisi formulir LHKPNnya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan fokus permasalahan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan system pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara dari manual ke elektronik terhadap tingkat kepatuhan lapor LHKPN pada Pemerintah Provinsi Banten.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi kepentingan dunia akademik maupun kepentingan dunia praktik.

1. Manfaat terhadap kepentingan dunia akademik

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai proses bisnis pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN secara elektronik.

2. Manfaat terhadap dunia praktik

Melalui penelitian yang sudah dilakukan diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan serta permasalahan yang dijumpai dalam proses pelaksanaan pelaporan harta kekayaan para Penyelenggara Negara di lingkup instansi daerah.

**POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A**